

## Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2025 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
<p>1. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan</p> <p>2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.</p>	-	<p>Materi muatan/substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila;</li> <li>2. UUD 1945;</li> <li>3. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>4. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>5. Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	<p>Materi muatan dalam Permenhub Nomor PM 5 Tahun 2025 telah mengacu dan memperhatikan pada beberapa Peraturan Menteri lainnya antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	-	<p>Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud telah dinyatakan selesai harmonisasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-494 tanggal 10 Februari 2025.</p>



Sekretaris Jenderal,

Novie Riyanto R.

NIP. 19661111 199503 1 001